BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendirian masyarakat tentang problem kemiskinan sejak dulu sudah berbeda-beda. Kaum kapitalis memandang bahwa kemiskinan itu termasuk salah satu bahaya kehidupan dan merupakan satu problematikanya. Tidak diragukan lagi, bahwa kemiskinan merupakan bahaya besar terhadap kepercayaan agama, khususnya kemiskinan yang sangat parah, yang berada di hadapan mata orang-orang kaya yang egois. Yang sangat mengkhawatirkan lagi, kalau orang-orang miskin itu tidak menentu pencahariannya, sedangkan pihak orang-orang yang kaya sama sekali tidak mau mengulurkan bantuannya.[1]

Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kesejahteraan merupakan impian setiap keluarga. Setiap anggota keluarga selalu menginginkan hidup yang sejahtera, dimana kebutuhan kehidupan hidup setiap anggota keluarga mampu terpenuhi secara layak. Namun banyak sekali hambatan yang membuat suatu keluarga tidak dapat mendapatkan kesejahteraan yang diharapkan. Suatu keluarga dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Yang paling utama untuk dipenuhi adalah kebutuhan primer. Karena kebutuhan primer adalah kebutuhan yang sangat melekat bagi manusia. Kebutuhan itu mulai dari pangan, sandang, papan, pendidikan dan masih banyak lagi.

---

[1] Yusuf Al-Qardawy, *Konsepsi Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan*. (PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1996), 13

Dalam Islam, mengharuskan setiap orang mencapai kehidupan yang layak sebagaimana manusia di masyarakat. Yaitu kehidupan yang terpenuhi, sedapat mungkin semua kebutuhan pokoknya berupa makanan, tempat tinggal, dan pakaian musim panas serta musim hujan. Islam dapat mencapai taraf hidup demikian bagi umatnya melalui solusi-solusi, antara lain adalah dengan bekerja. Bahwa setiap muslim diharuskan bekerja dan berusaha untuk mencari rezeki di muka bumi dan di bawah langit.[2]

Setiap Negara pasti memiliki masalah masing-masing. Tidak terkecuali Negara Indonesia. Yang merupakan Negara dengan jumlah penduduk tergolong besar, dengan berbagai macam suku, ras dan agama. Belum lagi keadaan alam Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar maupun kecil yang terpisah oleh wilayah perairan Indonesia. Tentu Negara Indonesia memiliki beberapa masalah, diantaranya adalah dibidang sosial ekonomi khususnya masalah kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang ditandai oleh rendahnya rata-rata kualitas hidup penduduk, pendidikan, kesehatan, gizi anak-anak, dan sumber air minum. Karena itu pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Dalam menanggulangi kemiskinan, pemerintah meluncurkan progam khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH).[3]

---

[2] Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2010), 42

[3] Dyah Ayu V. Implementasi Progam Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. http://Administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id diakses tanggal 20 Januari 2016

Dalam upaya melihat berbagai bidang kesejahteraan, pemerintah membuat kebijakan program keluarga harapan ini karena melihat dari sudut pandang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Indonesia sebagai Negara yang berkembang saat ini sangatlah minim sekali tentang pendidikan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itulah pemerintah berusaha untuk mementaskan masalah pendidikan dan kesehatan yang belum sepenuhnya sukses di Indonesia.

Program keluarga harapan merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang masuk kluster program perlindungan dan bantuan social yang ditunjukkan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Apabila dibanding dengan progam lain PKH, penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPPS) kemudian diverifikasi oleh pendamping PKH baru ditetapkan sebagai calon peserta PKH.

Untuk menjadi peserta PKH, pemerintah melakukan survey langsung ke tempat tinggal calon penerima PKH. Yang melakukan survey adalah pendamping PKH yang ditunjuk oleh pemerintah. Tidak seperti dana bantuan seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang hanya menggunakan data yang ada pada desa untuk menentukan penerima BLT. Namun terkadang juga ada penyelewengan data yang dilakukan pemerintah. Program yang merupakan kerjasama lintas kementrian ini, pada tahap awal pelaksanaan progam ini kelanjutannya dari program Bantuan Langsung Tunai yang diberikan bantuan tunai tanpa syarat. Berbeda dengan BLT, program ini mewajibkan RTSM harus memeriksakan ibu

hamil dan balita ke layanan kesehatan seperti posyandu dan puskesmas dan menyekolahkan anaknya di SD dan SMA.[4]

Dana bantuan yang diberikan pemerintah ini disalurkan memang khusus untuk pendidikan dan kesehatan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah memberikan dana bantuan ini untuk sampai tingkat SMA. Dana diserahkan kepada perempuan yang menjadi walinya (ibu, kakak perempuan, bibi). Sedangkan dalam bidang kesehatan, pemerintah memberikan dana bantuan kepada ibu hamil dan balita. Ibu hamil di berikan jadwal periksa ke posyandu dan puskesmas.

Tujuan dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok masyarakat miskin. Dalam jangka pendek, bantuan ini membantu mengurangi beban pengeluaran RTSM, sedangkan untuk jangka panjang, dengan mensyaratkan keluarga penerima untuk menyekolahkan anaknya, melakukan imunisasi balita, memeriksakan kandungan bagi ibu hamil, dan perbaikan gizi, diharapkan akan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Program yang digalakkan pemerintah pada tahun 2007 masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sangatlah membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan PKH menjadi program pemerintah yang signifikan untuk mempersempit gini rasio atau

---

[4] Herry Kaha. *Progam Keluarga Harapan: Ilusi Kesejahteraan (Percikan Perenungan Tertahap Progam Bantuan Tunai Di Indonesia)*. http://Herrykaha.blogspot.co.id diakses tanggal 20 Januari 2016

ketimpangan. Dijabarkannya, Bank Dunia merilis terjadi penambahan ketimpangan dari 2010 sampai 2014 menjadi 0,408. Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan gini rasio 0,39 pada akhir 2016 dan pada akhir masa pemerintahan atau 2019 menjadi 0,36. Ia menjelaskan, PKH diberikan kepada keluarga dengan status ekonomi sosial terendah.

"Semula batasan ekonomi sosial terendah di bawah 5 persen, kemudian berubah menjadi 8 persen, dan pada 2016 menjadi 11 persen," ujar Khofifah di sela-sela Pembukaan kegiatan Laporan Hasil Penelitian Pengkajian Konsep dan Indikator Kemiskinan di Hotel Santika Premiere. PKH, tuturnya, Sifatnya hibah karena kalau memberi pinjaman sulit, mengingat 80 persen keungan keluarga ekonomi sosial terendah habis untuk pangan. Ditambahkannya, Kementerian Sosial berencana membuka Direktorat Jenderal Penanggulangan Kemiskinan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Khofifah mengatakan struktur organisasi dan payung hukum sudah siap dan hanya menunggu pengesahan.Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kemensos Pepen Nazaruddin mengatakan dari hasil penelitian yang dilakukan masih terdapat ketidakcocokan indikator kemiskinan pusat dan daerah. "Ini persoalan klasik dan masih kami bahas apakah indikator dapat diganti atau saling melengkapi," tuturnya.[5]

Desa Banjarejo merupakan desa yang terletak di kecamatan Ngadiluwih kabupaten Kediri. Letak geografis dari desa Banjarejo berbatasan dengan kota

[5] http://www.harianjogja.com/baca/2015/12/12/program-keluarga-harapan-2016-penerima-bantuan-jadi-6-juta-670102 diakses tangggal 15 April 2016

Kediri yakni desa Manisrenggo kota Kediri. Keunikan desa Banjarejo yang berbeda dengan desa lain di kecamatan Ngadiluwih adalah sebaran penduduknya. Desa Banjarejo mempunyai 4 dusun, yang terletak berpisah-pisah antar dusun. Dari 4 dusun tersebut ada 2 dusun yang terletak kejauhan dari dusun lain bahkan jauh dari pusat desa (balai desa) yang terpisahkan oleh ladang masyarakat. Bahkan dalam pengurusan kependudukan 2 dusun yang jauh dari pusat desa tidak begitu terurus oleh pemerintahan desa. Sehingga kurangnya informasi menjadikan 2 dusun ini menjadikan kurang maju. Meskipun setiap dusun mempunyai kasun (kepala dusun) masing-masing. Dusun yang berpengaruh dalam kemajuan desa adalah dusun Paras dan dusun Banjarejo. Karena 2 dusun ini terletak berdampingan dengan pusat desa.

Dari kondisi ekonomi, masyarakat desa Banjarejo tergolong ekonomi menengah kebawah, sekalipun ada yang menengah keatas. Oleh karena itu, desa yang berada di kecamatan Ngadiluwih ini mendapat banyak dana bantuan sosial dari pemerintah. Salah satu dana bantuan tersebut adalah program keluarga harapan. PKH merupakan program yang diberikan kepada masyarakat desa Banjarejo yang dikhususkan untuk bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Tidak dapat dipungkiri, setiap desa pasti mempunyai masalah-masalah yang di hadapi. Masalah yang menonjol dari desa Banjarejo yang berhubungan dengan PKH adalah masalah kesehatan, terutama tempat berobat. Desa Banjarejo tidak memiliki puskesmas yang digunakan masyarakat untuk berobat, padahal mayoritas masyarakat desa Banjarejo adalah masyarakat ekonomi menengah kebawah. Karena mayoritas masyarakat desa Banjarejo bekerja sebagai buruh tani

bahkan ada pula yang penganguran. Berbeda dengan desa tetangga yang mempunyai puskesmas yang aktif dan terurus.

Untuk balita dan balita dan batita pemerintahan desa Banjarejo menyediakan layanan posyandu. Layanan posyandu memberikan penyuluhan tentang kesehatan balita. Sehingga layanan posyandu sangat bermanfaat bagi ibu-ibu untuk mengetahui perkembangan anak, mulai dari berat badan, gizi anak, dan lain sebagainya. Layanan posyandu juga menyediakan imunisasi bagi balita. Setiap dusun di desa Banjarejo mempunyai 2 unit posyandu. Untuk lembaga pendidikan yang ada di desa Banjarejo, formal dan non formal belum bisa berjalan dengan maksimal karena banyak faktor yang mempengaruhi.

Peneliti memfokuskan pada penelititian peranan PKH pada masyarakat desa Banjarejo, karena PKH merupakan progam yang disiplin dari pengretrutan anggaota PKH sampai tujuan dana PKH diawasi oleh pendamping PKH. Sedangkan pemilihan desa Banjarejo dikarenakan kurangnya fasilitas prasarana untuk berkembangnya peranan dana PKH di desa Banjarejo.

Dari konteks masalah yang telah diuraikan di atas maka peneliti mengambil judul PERANAN DANA PROGRAM KELUARGA HARAPAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.(Studi kasus Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri).

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang di atas, didapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana PKH di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat sesudah mendapat dana PKH di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?
3. Bagaimana peran dana PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan meneliti masalah ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana PKH di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat sesudah memperoleh dana PKH di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.
3. Untuk mengetahui peran dana PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penerima dana PKH

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana agar untuk selanjutnya bisa lebih baik lagi dalam pengeloaan dana PKH.

2. Bagi pengurus PKH

   Manfaat bagi pengurus PKH dapat dijadikan evaluasi terhadap kinerjanya. Selain itu dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan.

3. Bagi Peneliti

   Peneliti dapat lebih mengetahui manfaat dana PKH bagi masyarakat yang menerina dan cara mengelola mereka.

4. Bagi masyarakat

   Masyarakat agar lebih mengetahui fungsi dari PKH yang di berikan pemerintah untuk masyarakat. Serta memahami cara mengelola dana bantuan dari pemerintah dengan baik, agar tidak disalahgunakan.

E. Telaah Pustaka

1. Efektifitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Medan Johor, yang ditulis oleh Suji Novanda Sari untuk menempuh pendidikan S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2011 di Universitas Sumatra Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Medan Johor, untuk mengetahui tanggapan peserta penerima bantuan PKH, dan untuk mengetahui manfaat bagi penerima bantuan PKH . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif .[6]

2. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan (Suatu Studi di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo). Skripsi Claudio Usman Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) yang jelas dapat mengatasi kemelaratan itu. Penelitian ini ditempatkan di Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan sampel 90 responden. [7]

3. Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Sugihwaras Kec. Saradan Kab. Madiun skripsi Firman Kusuma Indrayani S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, UNESA. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas progam keluarga harapan di Desa Sudihwaras, Kec. Saradan, Kab. Madiun dengan konsep ketetapan sasaran progam, sosialisasi progam, tujuan progam, dan pemantauan progam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.

Dari tiga penelitian diatas, mengarah pada efektivitas PKH dan kesejahteraan masyarakat. Peneliti belum menemui tentang penelitian peranan

---

[6] http://repository.usu.ac.id/handle diakses tanggal 3 Maret 2016

[7] http://ejournal.unsrat.ac.id diakses tanggal 3 Maret 2016

PKH untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Maka peneliti ingin meneliti Peranan Dana PKH untuk Meningkatkan Kesejateraan Masyarakat.